

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Organisasi sektor publik yang sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga

keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016:13). Oleh itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) relevan; (2) andal; (3) dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami. (Mahmudi, 2016:11).

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M.Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga Negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. “Kami sangat berterimakasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa,” ungkap Ridwan di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Barat, Senin 12 Juni 2017. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai rp 11 triliun yang harus didata ulang. Dalam kurun waktu yang hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih rp 9 triliun. “Tinggal sedikit lagi. Rp 2,5 triliunnya memang enggak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset,”tuturnya. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu. Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. “Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final insya allah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap. “ujarnya.

Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. “Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi

juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikannya hutangnya, “ucap Ridwan Kamil. Kepala kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Memang catatan kami bahwa apa yang sudah dilakukan Pemda itu jauh lebih baik dari pada tahun lalu. Artinya sudah ada perkembangan dari apa yang sudah kami rekomendasikan tahun lalu dengan yang kami temukan tahun ini”, ucap Arman. Pada pemeriksaan kali ini, pemerintah kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini wajar tanpa pengecualian. Keempat faktor itu antara lain asset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. (Arief Gunawan, 2017).

Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung mengakui masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. Untuk mempercepat penyelesaian masalah aset, Pemerintah Kota Bandung sudah membentuk tim percepatan aset yang akan mengurus kejelasan aset di Kota Bandung. Tahun ini, pihaknya pun menargetkan 100 aset untuk diselesaikan sertifikasinya. Ada beberapa hal yang menjadi kendala Pemda untuk meraih WTP di antaranya yakni terkait masalah Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial. Selain itu, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai,

kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, dan ada juga penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak Pemda. (Annisa Putri, 2013)

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak pemerintah belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik ditinjau dari kualitasnya, salah satu faktornya yaitu dalam relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhann pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh banyak indikator penting. Hal tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai kualitas

laporan keuangan yang reliable. Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan diantaranya, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Kualitas laporan keuangan. Umumnya, pengendalian yang relevan dalam suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAPI 2011). Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: kualitas laporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman, Ari Udiyanti, Anantawikrama, Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ”. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Luh Nyoman, Ari Udiyanti, Anantawikrama, Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan adalah pada lokasi penelitiannya yaitu pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari pelaksanaan akuntansi di dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun internal pemerintah daerah. (Mahmudi, 2016:20).

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2016:27), menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul :

“ Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Pemerintah Kota Bandung) ”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Masih adanya perusahaan atau instansi yang memiliki masalah keuangan khususnya terkait pengelolaan aset.
2. Masih adanya perusahaan atau instansi yang kurang menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan.
3. Masih adanya perusahaan atau instansi yang belum optimal dalam menghasilkan laporan keuangan dengan baik.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

5. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem

Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu akuntansi. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (PEMKOT) melalui Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai salah satu syarat

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil bulan Agustus sampai dengan selesai.